



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Batu Sisir-Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. (0773) 31445, Fax (0773) 31545, Email : bpkadnatuna@yahoo.co.id
Ranai - Natuna



LAPORAN TAHUNAN

Tahun. 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dapat menyelesaikan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan 2021 merupakan refleksi pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Natuna tahun 2016 - 2021.

Disamping itu, penyajian Laporan Tahunan merupakan wujud dari transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan review untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Akhir kata semoga Laporan Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ranai, 05 Januari 2022

Plt. Kepala,



SURYANTO, SE, MA
NIP. 197709122000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Sejarah Berdirinya BPKAD.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM	3
A. Tujuan.....	3
B. Fungsi	3
C. Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
E. Sumber Daya Manusia	16
F. Sarana dan Prasarana	19
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	21
A. Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021.....	21
B. Program Prioritas BPKAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2016 - 2021.....	24
C. Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 yang disertai Pendanaannya	35
D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas.....	38
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.....	41
A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 3 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2019, 2020 dan 2021).....	41
B. Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.....	60
C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021	62
D. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021	64

E. Program/Kegiatan dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berdasarkan APBD 2022/DPA 2022).....	66
F. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten Dengan Kabupaten Lainnya.....	71
G. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	71
H. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan Tahun 2022/2023 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2021	72
 BAB V HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI.....	 74
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin.....	16
Tabel	2.2	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel	2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	17
Tabel	2.4	Komposisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan	17
Tabel	2.5	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel	2.6	Komposisi Pegawai PNS Menurut Diklat Kepemimpinan Tahun 2021	18
Tabel	2.7	Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Tahun 2021	19
Tabel	3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah.....	25
Tabel	3.2	Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2020 - 2021	34
Tabel	3.3	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36
Tabel	3.4	Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Sebelum Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39
Tabel	3.5	Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Setelah Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40
Tabel	4.1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	42
Tabel	4.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	44
Tabel	4.3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	46
Tabel	4.4	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	49
Tabel	4.5	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51

Tabel 4.6	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	53
Tabel 4.7	Hasil Capaian Kinerja Outcome/Output Program/Kegiatan APBD Kabupaten Natuna melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017,2018,2019, 2020,dan 2021.....	57
Tabel 4.8	Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2019, 2020 & 2021.....	61
Tabel 4.9	Capaian Indikator Sasaran Pendukung Visi Misi Bupati Natuna Tahun 2016 – 2021.....	63
Tabel 4.10	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017,2018,2019,2020 dan 2021.....	65
Tabel 4.11	Pelaksanaan dan Target Kinerja Program dan Kegiatan BPKPD Tahun Anggaran 2022	67
Tabel 4.12	Rekomendasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2022 / 2023 dari Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021	73
Tabel 5.1	Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2021.....	75
Tabel 5.2	Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2021	76
Tabel 5.3	Laporan Realisasi Anggaran Bidang Akutansi Keuangan Daerah Tahun 2021	77
Tabel 5.4	Laporan Realisasi Anggaran Bidang Aset Tahun 2021	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Struktur Organisasi.....	5
--------	-----	--------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi landasan Kabupaten Natuna untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada saat itu masih dalam struktur organisasi di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan. Kemudian pada tahun 2005, dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Kemudian pada tahun 2008 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dilakukan perubahan menjadi Organisasi Perangkat Daerah tersendiri menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Namun pada tahun 2011 berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Setelah beberapa tahun berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna, secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

A. Tujuan

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas **“Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya”**.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;

3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

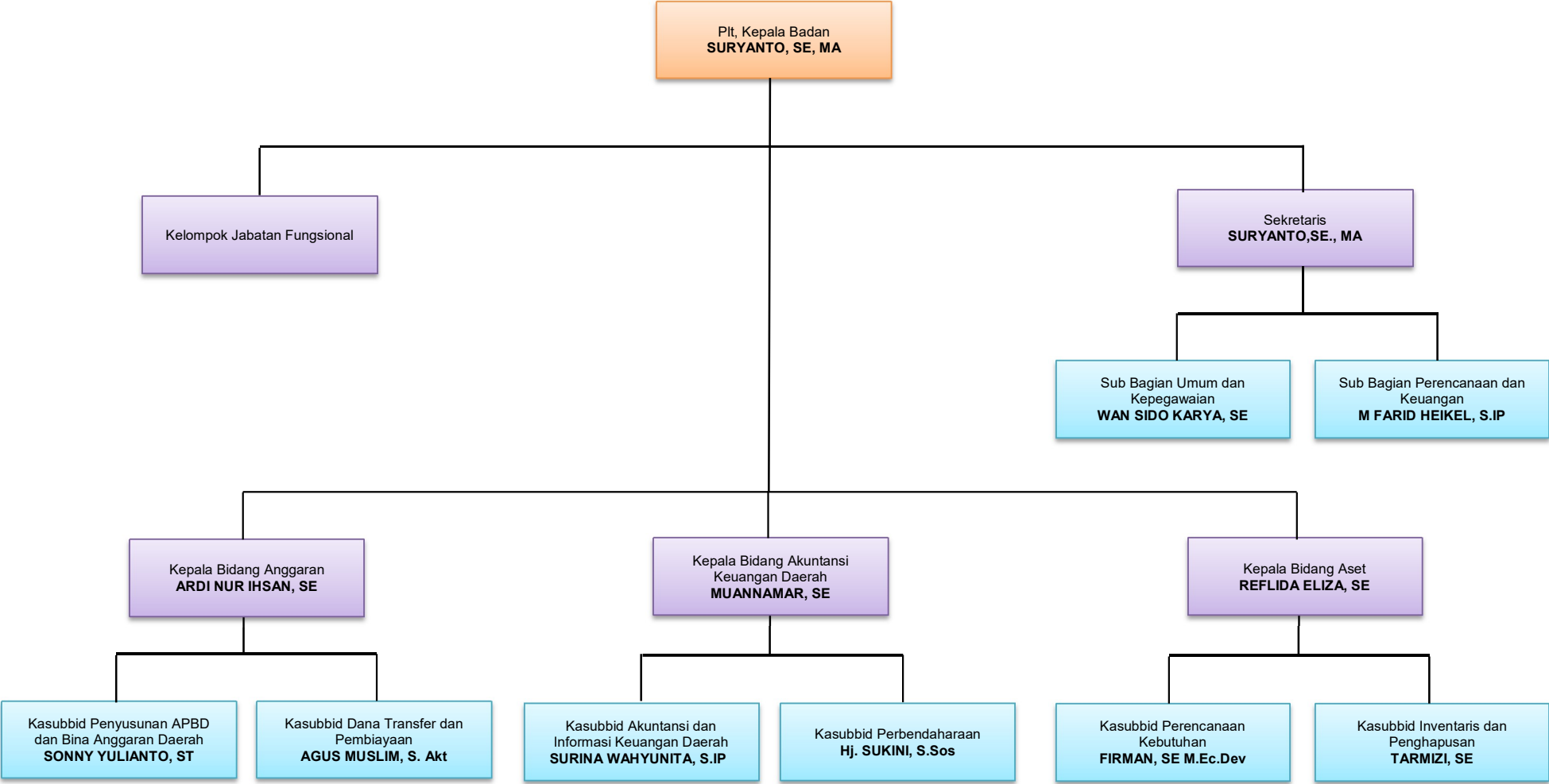
C. Kewenangan

Badan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Bagian Sekretaris, terdiri dari:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
 - ii. Sub Bidang Dana Transfer dan Pembiayaan.
4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Akuntansi dan informasi Keuangan Daerah;
 - ii. Sub Bidang Perbendaharaan.
5. Bidang Aset, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
 - ii. Sub Bidang Inventaris dan Penghapusan.

Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijelaskan dibawah ini:

1. Badan

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;

3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
 6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
 7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
 10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Kepala menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas Badan.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja lima tahun badan dan dilingkup sekretariat;
2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
4. Menyusun pelaporan badan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
7. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;
8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Anggaran

Ikhtisar Jabatan melaksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi, analisa, dokumentasi, pendataan, serta membuat laporan hasil kerja di Bidang Anggaran, berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok dalm perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknsi penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar. Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Invenstasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.

- a. Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang APBD;
 2. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang P-APBD;
 3. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD DN RKA-PPKD;
 4. Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD;
 5. Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun rancangan APBD;
 6. Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun rancangan Perubahan APBD;
 7. Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
 8. Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;
 9. Mengevaluasi pergeseran anggaran;
 10. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
 11. Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
 12. Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
 13. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
 14. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 15. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;
 16. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;
 17. Menyusun laporan penyertaan modal;
 18. Menyusun laporan dana bergulir;
 19. Menyusun investasi jangka pendek;
 20. Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;

21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
 22. Menyusun piutang hasil temuan.
- b. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
 2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 4. Menyiapkan data dana perimbangan;
 5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman daerah;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang anggaran;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan hasil kerja;
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aset

Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.

Tugas pokok bidang aset penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

- a. Uraian tugas bidang aset sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan kegiatan bidang aset;
 2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah melalui kepala Badan;
 6. Menyusun standar analisis satuan harga dan menyusun standar satuan harga
 7. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 8. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 9. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;
 10. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkup aset;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset;
 3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Ikhtisar jabatan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- a. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
 1. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
 4. Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;
 5. Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;
 6. Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;
 7. Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D;
 8. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
 10. Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 11. Mengkoordinasikan penyiapan pelaporan kas;
 12. Mengkoordinasikan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berjalan (Laporan Keuangan Bulanan (LRA) Laporan Keuangan Triwulan (LRA) dan Laporan Keuangan Semester (LRA, LO dan Neraca);
 13. Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 14. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya.
- b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
 3. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 4. Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan SP2D;
 5. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
 6. Pelaksanaan verifikasi atas pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK;
 7. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 8. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 9. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah dan penggajian;

10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Menyusun laporan keuangan daerah;
12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kedudukan sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi *“Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah”*. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. Kepala SKPD selaku PA.

Selaku SKPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan

5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Manusia

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	26
2	Perempuan	19
	Jumlah	45

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	7
	Jumlah	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Komposisi Pegawai menurut pangkat dan golongan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2021

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Tk. I (IV/c)	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	3
Jumlah		3
2	Penata Tk. I (III/d)	9
	Penata (III/c)	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)	11
	Penata Muda (III/a)	3
Jumlah		29
3	Pengatur Tk. I (II/d)	11
	Pengatur (II/c)	3
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah		14
4	Juru Tk. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda (I/b)	-
	Juru Tk. I (I/a)	-
Jumlah		-
5	Pegawai Honorer Daerah	24
Jumlah		24
	Jumlah Keseluruhan	69

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	23
3	Diploma	5

4	SLTA	15
Jumlah		45

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi pegawai Non PNS Daerah
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	11
2	Diploma	2
3	SLTA	9
4	SLTP	1
5	SD	1
Jumlah		24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Pegawai Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan

Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Komposisi pegawai menurut diklat kepemimpinan
Tahun 2021

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM II	1
2	PIM III	1
3	PIM IV	4
Jumlah		6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

E. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini:

Tabel 2.7
Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2021

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	kondisi
1	Kijang Inova	1	Unit	Baik
2	TOYOTA HILLUX	1	Unit	Baik
3	Sepeda Motor	14	Unit	Baik
4	Global Positioning System	5	Unit	Baik
5	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Baik
6	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
7	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
8	Lemari Kayu	9	Unit	Baik
9	Filing Cabinet Besi	12	Unit	Baik
10	Brankas	3	Unit	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	Paket	Baik
12	White Board	1	Unit	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	11	Unit	Baik
14	Display	1	Unit	Baik
15	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	7	Unit	Baik
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	Unit	Baik
17	Papan Nama Instansi	10	Unit	Baik
18	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	33	Unit	Baik
19	Instalasi Telephone	1	Unit	Baik
20	Meja Rapat	2	Unit	Baik
21	Meja Panjang	3	Unit	Baik
22	Bangku Tunggu	8	Unit	Baik
23	Rak Buku (Lemari Pakaian)	5	Unit	Baik
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik
25	Lemari Es	4	Unit	Baik
26	A.C. Split	34	Unit	Baik
27	Televisi	8	Unit	Baik
28	Unit Power Supply	40	Unit	Baik
29	Camera Video	1	Unit	Baik
30	Karpet	1	Unit	Baik
31	Tangki Air	2	Unit	Baik
32	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik

33	Gorden/Tirai	24	Unit	Baik
34	Meja Kerja	80	Unit	Baik
35	Kursi Kerja	89	Unit	Baik
36	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III (Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)	2	Unit	Baik
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis (Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II)	33	Unit	Baik
38	Rak Peralatan	4	Unit	Baik
39	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
40	Camera Digital	6	Unit	Baik
41	LCD Monitor	2	Unit	Baik
42	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
43	Mesin Fax (Loudspeaker)	1	Unit	Baik
44	Sound system	1	Unit	Baik
45	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit	Baik
46	Local Area Network (LAN)	4	Unit	Baik
47	P.C Unit	65	Unit	Baik
48	Lap Top (Laptop)	12	Unit	Baik
49	Note Book	48	Unit	Baik
50	Hard Disk	27	Unit	Baik
51	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	Unit	Baik
52	Printer (Peralatan Mini Komputer)	69	Unit	Baik
53	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6	Unit	Baik
54	Mouse (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	Baik
55	Monitor	1	Unit	Baik
56	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
57	External/ Portable Hardisk	3	Unit	Baik
58	UPS	12	Unit	Baik
59	Server	3	Unit	Baik
60	Router	11	Unit	Baik
61	Hub	4	Unit	Baik
62	Rak Server	1	Unit	Baik
63	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
JUMLAH		763		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021

Apa itu visi dan misi (*vision and mission*)? Pengertian **visi dan misi** adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Visi dan misi ini secara proses lahir dari organisasi tersebut didirikan dan menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi. Hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar semua pihak, baik internal maupun eksternal, mengetahui tujuan dari organisasi yang didirikan.

Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi juga merupakan cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis, di dalam visi biasanya terdapat pandangan tentang arah suatu manajemen kemana arah perusahaan tersebut dibawa.

Sedangkan pengertian misi secara umum adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya.

Dari pengertian diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna periode 2016 - 2021 memiliki visi yaitu **“Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”**, pernyataan tersebut memiliki makna, pertama cerdas berarti masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Sedangkan Mandiri memiliki makna masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam

rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah;
- b. Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik;
- c. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani;
- d. Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan;
- e. Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah;
- f. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan dan tanggungjawab terhadap misi, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menitikberatkan pada misi yang ke-6 yaitu **”Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat”**. Untuk mencapai visi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah diformulasikan dengan menitikberatkan pada tujuannya yaitu Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Program Pemerintah Daerah Pendukung Visi Misi RPJMD 2016 - 2021

Dalam mencapai target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi dijadikan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas, guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang tidak terpisahkan di setiap strategi dan arah kebijakan. Dengan itu, dibutuhkan arah kebijakan yang memberikan optimalisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program daerah. Program-program pada masing-masing arah kebijakan disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja. Dalam mengidentifikasi program-program prioritas yang bersifat strategis dilakukan dengan cara menganalisis strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditentukan, kemudian dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang sifatnya paling krusial. Sehingga akan terjalin keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan program yang ditetapkan. Dengan demikian maka akan terlihat alur keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya. Program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya aktifitas ekonomi daerah	S1.Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi daerah						
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian,kehutanan dan perikanan		1.	Pengembangan kawasan minapolitan	1.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Perikanan
				2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Perikanan
				3.	Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Penataan Tanah	Luas kawasan industri perikanan (ha)	Dinas Perikanan
		2.	Pengembangan kawasan agropolitan	4.	Program Penigkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi pertanian/ perkebunan (ton)	Dinas Pertanian
				5.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase kelompok peternak yang menggunakan teknologi	Dinas Pertanian
				6.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor)	Dinas Pertanian
				7.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi	Dinas Pertanian
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan		3.	Peningkatan daya saing produk daerah	8.	Program Peningkatan Kerjasama Internasional	Ekspor bersih perdagangan	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				9.	Program Pengembangan Teknologi Pedesaan	Jumlah pemanfaat TTG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata		4.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pariwisata	10.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				11.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara - Rata-rata lamatinggal wisatawan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
						nusantara	
				12.	Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah	Jumlah lahan yang dibebaskan (ha)	
Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah		5.	Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah	13.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				14.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (%)	
Menurunnya pencemaran air	S2. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	6.	Peningkatan konservasi hutan dan sumber air	15.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas lahan konservasi	Dinas Lingkungan Hidup
				16.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH	
		7.	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	17.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas lahan yang direhabilitasi (ha)	Dinas Lingkungan Hidup
				18.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Volume limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan (m3/hari)	
				19.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Volume sampah yang diangkut perhari	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya IPM					
Meningkatnya kualitas pendidikan	S3. Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	8.	Peningkatan mutu, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan	20.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				21.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B	
				22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah pelayanan data pendidikan, kepemudaan dan olah raga	
		9.	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik	23.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata nilai UASBN dan UN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
				24.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG)	Olahraga
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	10.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara merata	25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan di desa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				26.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara	
		11.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan obat masyarakat	27.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		12.	Peningkatan promosi kesehatan	28.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang ditingkatkan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Kapasitasnya	
						Persentase kecamatan yang mempunyai kebijakan PHBS	
		13.	Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat	29.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber PHBS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Persentase ketersediaan alkes di pelayanan kesehatan dasar	
						Persentase ketersediaan biaya rutin Puskesmas	
				30.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase kepesertaan jaminan kesehatan	
						Cakupan Puskesmas yang memiliki kapasitas penanganan HIV AIDS	
						Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar	
							Persentase penanggulangan penyakit menular

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah		Indikator Program	Perangkat Daerah
						Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	S5. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	14.	Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai potensi daerah	31.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				32.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	
		15.	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha) berperspektif gender	33.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Jumlah wirausaha	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				34.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				35.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	S6. Percepatan pengentasan Kemiskinan	16.	Perbaikan masalah kesejahteraan sosial masyarakat	36.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial (jiwa)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				37.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
		17.	Pengembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat miskin	38.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				39.	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	Angka rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah		Indikator Program	Perangkat Daerah
	S7. Pengembangan ekonomi kerakyatan	18.	Pengembangan sentra produksi Industri pengolahan (kawasan industri)	40.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				41.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi PDRB Sektor Industri	
		19.	Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	42.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				43.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan masyarakat pedesaan	
		20.	Pembentukan Sentra Usaha ekonomi masyarakat	44.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah rata-rata produksi IKM	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				45.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	
				46.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah produk unggulan UMKM	
Meningkatnya kesejahteraan petani	S8. Pengembangan Agribisnis	21.	Optimalisasi kelembagaan pertanian	47.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani (NTP)	Dinas Pertanian
				48.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh bersertifikat	
Meningkatnya konektivitas kecamatan/desa	S9. Peningkatan akses ke kawasan terisolir	22.	Pembukaan dan perluasan jalan ke kawasan terisolir	49.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan baru yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		23.	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	50.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
				51.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	
				52.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	
		24.	Peningkatan konektivitas antar wilayah	53.	Program Pengadaan Sarana dan Pasarana Transportasi Darat Antar Desa di Daerah Tertinggal	Persentase desa yang menerima bantuan moda angkutan barang dan angkutan penumpang	Dinas Perhubungan
				54.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang baik	Dinas Perhubungan
Meningkatnya konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah	S10. Peningkatan akses ke kawasan ekonomi	25.	Penyediaan transportasi antar pulau/desa/kecamatan/kawasan	55.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Angkutan Darat/Laut /udara	Dinas Perhubungan
		26.	Penyediaan infrastruktur kepelabuhan seperti kapal angkutan barang dan penumpang yang memadai	56.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang dan barang yang diangkut	Dinas Perhubungan
				57.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah Tertinggal	Persentase kecamatan yang menerima bantuan moda angkutan barang dan angkutan penumpang	
		27.	Peningkatan pelayanan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	58.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Satpol PP, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	S.11 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal			59.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan Perda	Satpol PP, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
		28.	Optimalisasi peran kelembagaan budaya dan agama dalam pembinaan masyarakat	60.	Program Pembinaan Keagamaan	Persentase pembinaan sosial budaya dan kemasyarakatan	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
Terwujudnya kesadaran berbudaya melayu		29.	Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dan karya sastra kuno	61.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah nilai budaya yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				62.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kekayaan budaya yang dikelola	
		30.	Pengembangan peran lembaga kebudayaan di setiap kecamatan	63.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Benda, situs dan kawasan cagara budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		31.	Peningkatan promosi, penyelenggaraan festival seni budaya	64.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih	S12. Reformasi Birokrasi	32.	Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	65.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				66.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Inspektorat
33.		Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	67.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
34.		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur	68.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah website perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya kualitas layanan publik		35.	Penerapan standar pelayanan (SP) sesuai dengan SPM	69.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase PD yang melaksanakan SPM	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
		36.	Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur PD	70.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase kelulusan peserta Diklat PIM III dan IV yang lulus sekali ujian Persentase kelulusan peserta diklat teknis Persentase kelulusan peserta diklat fungsional Persentase Widyaiswara yang memenuhi syarat kompetensi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	37.	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	71.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				72.	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi tersebut diatas telah diformulasi program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna menetapkan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan Indikator Program (*Outcome*) “Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku”, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

Kode	Misi, Tujuan, Sasaran Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Tahun 1 2017		Tahun 2 2018		Tahun 3 2019		Tahun 4 2020		Tahun 5 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	100%	100%	2.836.853	100%	2.779.482	100%	2.510.000	100%	3.910.000	100%	4.774.000	100%	16.810.335
Jumlah			100%	100%	2.836.853	100%	2.779.482	100%	2.510.000	100%	3.910.000	100%	4.774.000	100%	16.810.335

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Lampiran VII

C. Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD 2016 - 2021 yang disertai pendanaannya

Dalam mendukung RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan beberapa program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah;
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah;
10. Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah;
11. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya akan disajikan indikasi rencana program prioritas sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya
Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,236,643	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,641,443
3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,000	65%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000
3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000
3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	75%	170,000	75%	850,000
3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	580,000
3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360
		Opini Audit PBK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,435,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	990,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975
3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16	700,000	17	600,000	17	600,000	17	600,000	18	600,000	18	3,100,000
		Jumlah Objek Pajak	548	603	2,055,280	663	1,615,000	729	2,069,595	802	2,269,595	857	2,069,595	857	10,079,065
		Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,92 %	400,000	4,69 %	400,000	5,05 %	400,000	5,64 %	400,000	5,64 %	2,000,000
		Persentase Peningkatan PAD	10	10	344,360	10	365,000	10	570,000	20	570,000	30	570,000	30	2,419,360
3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190
3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000

3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	1,436,500
		Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000
3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000
		Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021
Lampiran VIII

D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja dan program dan kegiatan prioritas tertuang di dalam Renstra. Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Berikut disajikan Matrik Renstra Perangkat Daerah sebelum dan sesudah perubahan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Sebelum Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN										Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah.	1. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan RAPBD; 2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 3. Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD; 2. Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Daerah; 3. Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca pemerintah kabupaten	3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,236,643	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,641,443	BPKAD
			3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,000	65%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000	BPKAD
			3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000	BPKAD
			3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	75%	170,000	75%	850,000	BPKAD
			3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	580,000	BPKAD
			3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360	BPKAD
					Opini Audit PBK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,435,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	990,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113	BPKAD
					Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975	BPKAD
			3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16	700,000	17	600,000	17	600,000	17	600,000	18	600,000	18	3,100,000	BP2RD
					Jumlah Objek Pajak	548	603	2,055,280	663	1,615,000	729	2,069,595	802	2,269,595	857	2,069,595	857	10,079,065	BP2RD
					Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,92 %	400,000	4,69 %	400,000	5,05 %	400,000	5,64 %	400,000	5,64 %	2,000,000	BP2RD
					Persentase Peningkatan PAD	10	10	344,360	10	365,000	10	570,000	20	570,000	30	570,000	30	2,419,360	BP2RD
			3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190	BPKAD
			3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000	BPKAD
			3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	1,436,500	BPKAD
					Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000	BPKAD
			3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000	BPKAD
					Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000	BPKAD

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021

Tabel 3.5
Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Setelah Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM SETELAH PERUBAHAN										Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)				
		Target		Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,236,643	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,641,443	BPKAD
			3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,000	65%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000	BPKAD
			3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000	BPKAD
			3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	75%	170,000	75%	850,000	BPKAD
			3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	580,000	BPKAD
			3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360	BPKAD
					Opini Audit PBK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,435,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	990,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113	BPKAD
					Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975	BPKAD
			3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16	700,000	17	600,000									BP2RD
					Jumlah Objek Pajak	548	603	2,055,280	663	1,615,000									BP2RD
					Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,92 %	400,000									BP2RD
					Persentase Peningkatan PAD	10	10	344,360	10	365,000									BP2RD
			3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190	BPKAD
			3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000	BPKAD
			3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100.0	309,100	100	309,100	100	1,436,500	BPKAD
					Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000	BPKAD
			3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000	BPKAD
					Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000	BPKAD

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 3 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2019, 2020 dan 2021)

Sistem perencanaan dan penganggaran secara regulasi telah mengalami beberapa kali perubahan dalam penerapannya. Dari mulai menggunakan pendekatan tradisional hingga menjadi penganggaran berbasis kinerja (PBK). Perubahan ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja terus melakukan perbaikan salah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja. Sudah seharusnya proses perencanaan anggaran dengan cara melakukan *benchmarking* terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk mendapatkan *best practices* yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi antara *satkeholder* diharapkan dapat menciptakan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Sejalan dengan itu, evaluasi kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai visi dan misi menjadi faktor utama yang bukan hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,014,606,040.00	2,787,928,740.00	92.48
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	318,150,000.00	159,867,500.00	50.25
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	110,000,000.00	108,549,000.00	98.68
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	150,000,000.00	149,916,000.00	99.94
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	267,500,000.00	267,363,500.00	99.95
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	343,800,000.00	330,183,500.00	96.04
		Output	Unit	40	40	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	65,000,000.00	39,156,000.00	60.24
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	125,000,000.00	119,640,000.00	95.71
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	600,100,000.00	596,139,980.00	99.34
		Output	Kali	34	40	117.65
		Outcome	Persen	100.00	117.65	117.65
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Input	Rupiah	703,826,040.00	687,920,160.00	97.74
		Output	Orang	36	36	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	286,230,000.00	284,193,100.00	99.29
		Output	Kali	40	35	87.50
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			330,500,000.00	328,836,900.00	99.50
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	192,800,000.00	191,506,900.00	99.33
		Output	Unit	22	22	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	85,200,000.00	84,830,000.00	99.57
		Output	Unit	32	32	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			135,000,000.00	92,468,540.00	68.50
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Input	Rupiah	135,000,000.00	92,468,540.00	68.50
		Output	Orang	15	15	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			7,561,017,000.00	7,099,734,186.00	93.90
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,379,850,000.00	1,343,360,073.00	97.36
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,337,900,000.00	1,298,940,077.00	97.09
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Input	Rupiah	519,630,000.00	484,457,257.00	93.23
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan	Input	Rupiah	689,470,000.00	630,705,739.00	91.48
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	572,450,000.00	516,278,722.00	90.19
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	865,902,000.00	831,342,933.00	96.01
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	354,312,000.00	307,108,644.00	86.63
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Input	Rupiah	1,841,303,000.00	1,687,540,741.00	91.65
		Output	Aplikasi	5	5	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			1,532,782,000.00	1,524,806,585.00	99.48
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Input	Rupiah	278,250,000.00	271,479,828.00	97.57
		Output	Bulan	12	12	100.00

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Input	Rupiah	394,500,000.00	394,211,000.00	99.93
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	860,032,000.00	859,115,757.00	99.89
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
53.03.	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
		Output	Orang	80	80	100.00
		Outcome	Persen	85.00	85.00	100.00
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			816,606,000.00	660,434,373.00	80.88
56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Input	Rupiah	321,860,000.00	220,880,246.00	68.63
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	100.00	100.00	100.00
56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Input	Rupiah	494,746,000.00	439,554,127.00	88.84
		Output	SKPD	45	45	100.00
		Outcome	Persen	80.00	80.00	100.00
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			2,221,419,000.00	1,991,475,838.00	89.65
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	166,078,000.00	147,204,080.00	88.64
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.03.	Penghapusan dan penindahtanganan barang milik daerah	Input	Rupiah	276,242,000.00	218,088,552.00	78.95
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	312,982,000.00	267,730,385.00	85.54
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Input	Rupiah	653,187,000.00	602,992,739.00	92.32
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Input	Rupiah	211,216,000.00	197,396,000.00	93.46
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	336,327,000.00	326,978,484.00	97.22
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	265,387,000.00	231,085,598.00	87.07
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
				15,798,996,040.00	14,654,719,063.00	92.76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2019

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019 pada tabel diatas, penyerapan anggaran program dan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14,654,719,063.00 atau 92,76% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 15,798,996,040.00, target *output* dan *outcome* sesuai dengan yang direncanakan. Sisa anggaran sebesar 6,24% merupakan penghematan dari anggaran dan secara target kinerja telah terpenuhi.

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp12.859.426.739,00 atau sebesar 91,19% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp14.102.106.598,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penyerapan anggaran turun sekitar 1,57% namun dari sisi alokasi turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak menjadi kinerja yang sudah ditetapkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi tidak optimal, justru secara *output* dan *outcome* semua sudah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			2,724,917,015.00	2,700,080,126.00	99.09%
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	23,000,000.00	22,990,000.00	99.96%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	531,910,000.00	531,910,000.00	100.00%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	102,540,000.00	102,512,000.00	99.97%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	120,000,000.00	119,931,500.00	99.94%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	194,000,000.00	193,675,000.00	99.83%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	361,000,000.00	358,175,200.00	99.22%
		Output	Unit	20	20	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	30,000,000.00	17,200,000.00	57.33%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	5,398,000.00	5,370,000.00	99.48%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	317,300,000.00	313,492,678.00	98.80%
		Output	kali	36	36	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Input	Rupiah	653,171,015.00	648,396,848.00	99.27%
		Output	Orang	37	37	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.20	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	386,598,000.00	386,426,900.00	99.96%
		Output	kali	36	36	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02	Program peningkatan sarana prasarana Aparatur			250,500,000.00	237,661,214.00	94.87%
02.16	Penyediaan gedung gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00%
		Output	Gedung	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Input	Rupiah	50,000,000.00	49,875,000.00	99.75%
		Output	Gedung	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Input	Rupiah	82,000,000.00	69,287,714.00	84.50%
		Output	Unit	8	8	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	66,000,000.00	65,998,500.00	100.00%
		Output	Unit	34	34	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0.00	0.00	0.00
05.04	Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Bulan	0.00	0.00	0.00%
		Outcome	Persen	0.00	0.00	0.00%
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			83,549,000.00	73,356,206.00	87.80%
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	83,549,000.00	73,356,206.00	87.80%
		Output	Laporan	3	3	100.00%
		Outcome	Persen	0.00	0.00	0.00%
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			7,678,574,985.00	6,708,241,010.00	87.36%
17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Input	Rupiah	110,386,820.00	109,740,820.00	99.41%
		Output	Perbup	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.06	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,176,360,000.00	1,081,741,942.00	91.96%
		Output	Perda	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.07	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,286,537,999.00	1,157,620,098.00	89.98%
		Output	Perda	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.10	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi pelaporan akuntansi	Input	Rupiah	442,990,780.00	420,107,390.00	94.83%
		Output	Aplikasi	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.11	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan	Input	Rupiah	442,515,420.00	439,004,420.00	99.21%
		Output	Aplikasi	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	377,884,900.00	367,443,412.00	97.24%
		Output	Laporan	3	3	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.27	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	670,170,000.00	571,983,920.00	85.35%
		Output	Kegiatan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.29	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Input	Rupiah	850,271,053.00	824,919,422.00	97.02%
		Output	kali	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.75	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	266,675,013.00	266,443,653.00	99.91%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.90	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	Input	Rupiah	267,250,000.00	260,936,453.00	97.64%
		Output	Aplikasi	2	2	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.92	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Input	Rupiah	1,787,533,000.00	1,208,299,480.00	67.60%
		Output	Aplikasi	2	2	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			1,123,058,807.00	1,000,166,607.00	89.06%
52.01	Penyelenggaraan pelayanan penggalangan	Input	Rupiah	142,589,188.00	142,572,188.00	99.99%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52.02	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), Anggaran kas dan SP2D	Input	Rupiah	341,600,000	341,573,000.00	99.99%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52.04	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Input	Rupiah	166,641,619.00	166,641,619.00	100.00%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52.06	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Input	Rupiah	472,228,000.00	349,379,800.00	73.99%
		Output	Kali	4	4	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			0.00	0.00	0.00%
53.03	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	0	0	0.00%
		Output	SKPD	46	0	0.00%
		Outcome	Persen	100%	0%	0.00%
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			520,428,221.00	509,487,321.00	97.90%
56.02	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Input	Rupiah	165,840,000.00	158,890,300.00	95.81%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
56.03	Peningkatan laporan kinerja keuangan daerah	Input	Rupiah	354,588,221.00	350,597,021.00	98.87%
		Output	SKPD	45	45	100.00%
		Outcome	Persen	80%	80%	100.00%
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			1,687,989,720.00	1,597,345,405.00	94.63%
57.02	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Input	Rupiah	113,900,720.00	99,508,520.00	87.36%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.03	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Input	Rupiah	340,938,000.00	304,984,648.00	89.45%
		Output	Bulan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.04	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	346,499,000.00	333,842,907.00	96.35%
		Output	Bulan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	50%	108.70%
57.05	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset Kabupaten Natuna	Input	Rupiah	534,628,000.00	518,882,622.00	97.05%
		Output	Kali	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.08	Appraisal aset/ barang daerah	Input	Rupiah	145,618,000.00	139,045,968.00	95.49%
		Output	Kegiatan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	65%	65%	100.00%
57.09	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	206,406,000.00	201,080,740.00	97.42%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
57.1	Inventarisasi barang milik daerah	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
3.05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			33,088,850.00	33,088,850.00	100.00%
41.06	Penyusunan standar satuan harga	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Dokumen	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
41.07	Penyusunan analisis standar belanja	Input	Rupiah	33,088,850.00	33,088,850.00	100.00%
		Output	Dokumen	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
				14,102,106,598.00	12,859,426,739.00	91.19%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2020

Besaran anggaran dan maksimalnya penyerapan anggaran tidak menjamin kinerja dari suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu perlu pemahaman yang baik tentang anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran

pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp15.209.295.810,00 atau sebesar 92,67% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 16.411.855.067,00. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NOMOR	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2			3	4	6
	URUSAN KEUANGAN			16.411.855.067,00	15.209.295.810,00	92,67
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			405.042.000,00	367.235.800,00	90,67%
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	input	rupiah	50.130.000,00	48.489.800,00	96,73%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	input	rupiah	354.912.000,00	318.746.000,00	89,81%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.529.758.068,00	7.248.383.530,00	96,26%
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	input	rupiah	7.529.758.068,00	7.248.383.530,00	96,26%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000,00	99.979.000,00	99,98%
01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	input	rupiah	100.000.000,00	99.979.000,00	99,98%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			891.200.000,00	664.465.951,00	74,56%
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	input	rupiah	215.000.000,00	95.000.000,00	44,19%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	unit	26,00	19,00	73,07%
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	input	rupiah	80.000.000,00	79.200.000,00	99,00%
		output	bulan	12,00	12,00	93,75%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	input	rupiah	87.000.000,00	20.250.000,00	23,28%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	input	rupiah	145.000.000,00	144.283.000,00	99,51%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	input	rupiah	20.000.000,00	17.100.000,00	85,50%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	input	rupiah	344.200.000,00	308.632.951,00	89,67%
		output	kali	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	73,00	69,00	94,52%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.293.700.000,00	1.242.979.032,00	96,08%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	input	rupiah	25.000.000,00	24.111.000,00	96,44%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	96,44%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	input	rupiah	650.400.000,00	643.246.500,00	98,90%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	input	rupiah	618.300.000,00	575.621.532,00	93,10%

NOMOR	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	ANGGARAN	REALISASI	%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			299.346.000,00	253.740.791,00	84,77%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	input	rupiah	115.205.000,00	73.556.791,00	63,85%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	input	rupiah	184.141.000,00	180.184.000,00	97,85%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.830.350.000,00	1.698.217.914,00	92,78%
02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	input	rupiah	625.200.000,00	583.225.994,00	93,29%
		output	perda	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	input	rupiah	618.650.000,00	549.742.475,00	88,86%
		output	perda	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	input	rupiah	586.500.000,00	565.249.445,00	96,38%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			789.874.000,00	714.243.856,00	90,43%
02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	input	rupiah	226.588.000,00	205.816.570,00	90,83%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	input	rupiah	301.100.000,00	252.673.000,00	83,92%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	input	rupiah	262.186.000,00	255.754.286,00	97,55%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.393.370.420,00	1.311.798.200,00	94,15%
02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	input	rupiah	136.073.660,00	136.381.000,00	100,23%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	input	rupiah	1.257.296.760,00	1.175.417.200,00	93,49%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.	03.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.879.214.579,00	1.591.251.736,00	84,68%
03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	input	rupiah	239.292.379,00	217.600.000,00	90,93%
		output	dokumen	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	input	rupiah	81.059.480,00	74.650.000,00	92,09%
		output	dokumen	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	input	rupiah	229.429.040,00	207.095.000,00	90,27%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	input	rupiah	120.788.760,00	97.066.000,00	80,36%
		output	dokumen	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	input	rupiah	285.624.580,00	243.978.142,00	85,42%
		output	laporan	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	input	rupiah	200.000.000,00	169.795.400,00	84,90%
		output	kegiatan	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	input	rupiah	184.638.580,00	135.643.900,00	73,46%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%

NOMOR	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	ANGGARAN	REALISASI	%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	input	rupiah	343.600.000,00	316.674.400,00	92,16%
		output	bast	2,00	2,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	input	rupiah	194.781.760,00	128.748.894,00	66,10%
		output	laporan	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL			16,411,855,067,00	15,209,295,810,00	92,67%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2021

Tabel 4.4
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan dan Tindak Lanjut
			Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi	12 Bulan	3,014,606,040	12	2,787,928,740	100.00	92		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000	12	45,000,000	100	100		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	318,150,000	12	159,867,500	100	50		
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	110,000,000	12	108,549,000	100	99		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	150,000,000	12	149,916,000	100	100		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	267,500,000	12	267,363,500	100	100		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	343,800,000	40	330,183,500	100	96		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	65,000,000	12	39,156,000	100	60		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000	12	119,640,000	100	96		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 Kali	600,100,000	77	596,139,980	213.89	99		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	703,826,040	37	687,920,160	100	98		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	286,230,000	59	284,193,100	163.89	99		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	330,500,000	59.55%	328,836,900	85.07	99		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	1	52,500,000	100	100		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 Unit	192,800,000	9	191,506,900	112.5	99		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	32 Unit	85,200,000	30	84,830,000	93.75	100		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65%	135,000,000	46.81%	92,468,540	72.02	68		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	135,000,000	13	92,468,540	86.67	68		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	BB/76,00	104,616,000	BB/76,8	94,871,117	101.12	91		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	104,616,000	2	94,871,117	66.67	91		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Ketepatan Waktu Dalam Penetapan APBD	Tepat Waktu	2,717,750,000	Tepat Waktu	2,642,300,150	100	97		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,379,850,000	1	1,343,360,073	100	97		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,337,900,000	1	1,298,940,077	100	97		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	4 Aplikasi	2,075,002,000	4	1,946,505,929	100	94		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	519,630,000	1	484,457,257	100	93		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	689,470,000	1	630,705,739	100	91		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 Kegiatan	865,902,000	1	831,342,933	100	96		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Opini Audit BPK	WTP	2,413,753,000	WTP	2,203,819,463	100	91		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	572,450,000	3	516,278,722	100	90		
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 Aplikasi	1,841,303,000	5	1,687,540,741	100	92		

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan/ dan Tindak Lanjut
			Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi Pajak Daerah	12 Bulan	354,512,000	12	307,108,644	100	87		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH) SKPD	12 Bulan	354,512,000	12	307,108,644	100	87		
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	1,532,782,000	12	1,524,806,585	100	99		
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	278,250,000	12	271,479,828	100	98		
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	394,500,000	12	394,211,000	100	100		
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	860,032,000	4	859,115,757	100	100		
53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	85%	82,450,000	75.56	74,162,784	88.89	90		
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bintek pengelolaan barang daerah	48 SKPD	82,450,000	34	74,162,784	70.83	90		
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	816,606,000	WTP	660,434,373	100	81		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	321,860,000	5	220,880,246	500	69		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	494,746,000	45	439,554,127	100	89		
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	46%	2,221,419,000	44.46%	1,991,475,838	96.65	90		
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 Laporan	166,078,000	1	147,204,080	100	89		
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	276,242,000	1	218,088,552	100	79		
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	312,982,000	1	267,730,385	100	86		
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	653,187,000	2	602,992,739	200	92		
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah laporan daftar kendaraan milik Pemda	1 Laporan	211,216,000	1	197,396,000	100	93		
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	336,327,000	1	326,978,484	100	97		
57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	265,387,000	1	231,085,598	100	87		
TOTAL				15,798,996,040		14,654,719,063		93		

Sumber : Data olahan

Tabel 4.5
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan/ dan Tindak Lanjut
			Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi	12 Bulan	2,724,917,015	12	2,700,080,126	100	99.09		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	23,000,000	12	22,990,000	100	99.96		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	531,910,000	12	531,910,000	100	100.00		
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	102,540,000	12	102,512,000	100	99.97		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000	12	119,931,500	100	99.94		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan pengadaan	12 Bulan	194,000,000	12	193,675,000	100	99.83		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	361,000,000	20	358,175,200	100	99.22		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	30,000,000	12	17,200,000	100	57.33		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	5,398,000	12	5,370,000	100	99.48		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 Kali	317,300,000	36	313,492,678	100	98.80		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	653,171,015	37	648,396,848	100	99.27		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	386,598,000	36	386,426,900	100	99.96		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	250,500,000	59,55%	237,661,214	85,07	94.87		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	1	52,500,000	100	100.00		
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	50,000,000	1	49,875,000	100	99.75		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 Unit	82,000,000	8	69,287,714	100	84.50		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	34 Unit	66,000,000	34	65,998,500	100	100.00		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0%	0	0.00%	0	0	0.00		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	0	13	0	0	0.00		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	BB/76,00	83,549,000	BB/76,85	73,356,206	101.12	87.80		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	83,549,000	3	73,356,206	100	87.80		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Dalam Penetapan APBD	Tepat Waktu	4,396,211,019	Tepat Waktu	4,041,135,043	91.92	91.92		
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Perbup APBD	1 Perbup	110,386,820	1	109,740,820	100			
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,176,360,000	1	1,081,741,942	100	97		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,286,537,999	1	1,157,620,098	100	97		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	442,990,780	1	420,107,390	100	93		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	442,515,420	1	439,004,420	100	91		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 Kegiatan	670,170,000	1	571,983,920	100	96		
17.90	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi BMD	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi aplikasi BMD	2 Aplikasi	267,250,000	2	260,936,453	100			

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	3,015,688,953	WTP	2,400,662,314	100	79.61		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	377,884,900	3	367,443,412	100	97.24		
17.29	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah		12 Kali	850,271,053	12	824,919,422	100			
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 Aplikasi	1,787,533,000	5	1,208,299,480	100	67.60		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi Pajak Daerah	12 Bulan	266,675,013	12	266,443,653	100	99.91		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH) SKPD	12 Bulan	266,675,013	12	266,443,653	100	99.91		
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	1,123,058,807	12	1,000,166,607	100	89.06		
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggalan	Pelayanan penggalan Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	142,589,188	12	142,572,188	100	99.99		
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	341,600,000	12	341,573,000	100	99.99		
52.04.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Informasi keuangan daerah	12 Bulan	166,641,619	12	166,641,619	100	100.00		
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	472,228,000	4	349,379,800	100	73.99		
53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi	85%	0	75.56	0	0.00	0		
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	48 SKPD	0	0	0	0	0		
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	520,428,221	WTP	509,487,321	100	97.90		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	165,840,000	1	158,890,300	100	95.81		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	354,588,221	45	350,597,021	100	98.87		
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	46%	1,687,989,720	44.46%	1,597,345,405	96.65	90		
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 Laporan	113,900,720	1	99,508,520	100	89		
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	340,938,000	1	304,984,648	100	79		
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	346,499,000	1	333,842,907	100	86		
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	534,628,000	2	518,882,622	200	92		
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	145,618,000	1	139,045,968	100	97		
57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	206,406,000	1	201,080,740	100	87		
57.10.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Invenyaris Barang Milik Daerah	1 Laporan	0	1	0	100	87		
41	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		82%	33,088,850	82%	33,088,850	100	100		
41.06	Penyusunan standar satuan harga	Laporan Standar Satuan Harga	1 Dokumen	0	1	0	100	0		
41.07	Penyusunan analisis standar belanja	Laporan Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	33,088,850	1	33,088,850	100	100		
TOTAL				14,102,106,598		12,859,426,739		91.19		

Sumber : Data olahan

Tabel 4.6
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	Urusan / Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan/dan Tindak Lanjut
			Output/Outcome	Anggaran	Output/Outcome	Anggaran	Output/Outcome	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.	KEUANGAN									
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat / Nilai Akuntabilitas	80 A	10.518.916.068	80	9.755.027.964	100,00	92,74		
2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat / Nilai Akuntabilitas	80 A	404.912.000	80	367.235.800	100,00	90,70		
01	Penyusunan Dokumen Preangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3	48.489.800	100,00	96,98		
06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	3 laporan	354.912.000	3	318.746.000	100,00	89,81		
2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu pembayaran administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	7.529.758.068	12	7.248.383.530	100,00	96,26		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	12 Bulan	7.529.758.068	12	7.248.383.530	100,00	96,26		
2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	100.000.000	12	99.979.000	100,00	97,95		
07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	100.000.000	12	99.979.000	100,00	97,95		
2.06.	Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Administrasi Perangkat Daerah	75 Persen	891.200.000	75	664.465.951	100,00	74,51		
02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 Unit	215.000.000	26	95.000.000	100,00	44,19		
03.	Penyediaan bahan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	12 Bulan	80.000.000	12	79.200.000	100,00	99,00		
04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan logistik kantor	12 Bulan	87.000.000	12	20.250.000	100,00	23,28		
05.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	145.000.000	12	144.283.000	100,00	99,51		
06.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20.000.000	12	17.100.000	100,00	83,50		
07.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 Kali	344.200.000	72	308.632.951	100,00	89,67		
2.08.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.293.700.000	12	1.242.979.072	100,00	89,71		
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	25.000.000	12	24.111.000	100,00	96,44		
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	650.400.000	12	643.246.500	100,00	91,06		
04.	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah PTT	37 Orang	618.300.000	37	575.621.532	100,00	88,01		

NO	Urusan / Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan/dan Tindak Lanjut
			Output/Outcome	Anggaran	Output/Outcome	Anggaran	Output/Outcome	Anggaran		
2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	75 Persen	299.346.000	75	253.740.791	100,00	72,45		
02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 Unit	115.205.000	8	73.556.791	100,00	31,84		
09.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah terpeliharayan dan penyediaan gedung kantor lainnya	1 Gedung	184.141.000	1	180.184.000	100,00	97,85		
02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dala penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Tepat Waktu	4,013,594,420	Tepat	3,724,259,970	Tepat Waktu	92,79		
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu dala penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Tepat Waktu	1,830,350,000.00	Tepat	1.698.217.914	Tepat Waktu	92,78		
07.	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	1 Perda	625.200.000	1	583,225,994.00	100,00	51,49		
08.	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd	Ketepatan waktu dalam penetapan Perubahan APBD	1 Perda	618.650.000	1	549,742,475.00	100,00	80,62		
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Keuangan Belanja Daerah	12 Bulan	586.500.000	12	565,249,445.00	100,00	77,78		
2.02	Koordinasi dan Pegelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertibnya administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	789.874.000	12	660.274.856	100,00	83,59		
01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Triwulan	226.588.000	4	196.524.570	100,00	86,73		
05.	Koordinasi, fasilitasi,asistensi,sinkronisasi,supervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 Tahun	301.100.000	1	212.673.000	100,00	70,63		
07.	Koordinasi dan penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas daerah,Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Daftar Transaksi harian (DTH), Pelayanan penggajian Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	262.186.000	12	251.077.286	100,00	95,76		
2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Opini Audit BPK	Opini WTP	1.393.370.420	Opini	1.243.161.000	WTP	89,22		
01.	Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan koordinasi akutansi penerimaan dan pengeluaran kas	45 OPD	136.073.660	45	107.743.800	100,00	79,18		
03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulan, Triwulan dan Semesteran	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	1.257.296.760	1	1.135.417.200	100,00	90,31		
03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	65 Persen	1.987.752.200	65	1.444.767.741	100,00	72,68		
2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	65 Peesen	1.987.752.200	65	1.444.767.741	100,00	72,68		
01	Penyusunan Standar Harga	jumlah dokumen standar satuan harga	1 Dokumen	348.200.000	1	208.600.000	100,00	59,91		
02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	-	0	-	0,00	0,00		
03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dokumen	1 Dokumen	81.059.480	1	64.650.000	100,00	79,76		
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah bulan penatausahaan barang milik daerah	12 Bulan	229.429.040	12	182.425.000	100,00	79,51		

NO	Urusan / Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan/dan Tindak Lanjut
			Output/Outcome	Anggaran	Output/Outcome	Anggaran	Output/Outcome	Anggaran		
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen inventaris Barang Daerah	1 Dokumen	120.778.760	1	94.866.000	100,00	78,55		
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan monitoring Barang Milik Daerah	1 laporan	285.264.580	1	189.364.147	100,00	66,38		
08	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian aset dalam pemberlakuan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	200.000.000	1	166.995.400	100,00	83,50		
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah validasi data laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Validasi	-	0	-	0,00	0,00		
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedian Data BMD yang Akuntabel	1 Dokumen	184.638.580	1	117.643.900	100,00	63,72		
11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi data aset	2 Semester	343.600.000	2	303.474.400	100,00	88,32		
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan mutasi barang milik daerah	1 laporan	194.781.760	1	116.748.894	100,00	59,94		
TOTAL				16,411,855,067,00		15,209,295,810,00		92,67		

Sumber : Data olahan

a. Capaian Kinerja Outcome/Output Program/Kegiatan APBD Kabupaten Natuna

Capaian kinerja dari semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan indikator sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2016 -2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017,2018,2019,2020,dan 2021.

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut proses pelaksanaan dan permasalahan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengungkapan rincian mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai serta penilaian atas hasil pengukuran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai 100 % dari target yang direncanakan, pencapaian ini membuktikan antara strategi dan kebijakan yang dibuat telah tercapai dengan baik walaupun dampak penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid19) dalam penanganan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ikut mempengaruhi capaian tersebut.

Berikut disajikan Hasil Capaian Kinerja Outcome/Output Program/Kegiatan APBD Kabupaten Natuna melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017,2018,2019, 2020,dan 2021 sebagai berikut :

TABEL HASIL, CAPAIAN KINERJA OUTPUT/OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN BPKAD MELALUI RKPD
TAHUN 2017, 2018, 2019, 2020 DAN 2021

NO	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	TARGET KINERJA										REALISASI										CAPAIAN (%)										MASALAH/DAKLANU	
			2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021			
			Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	4,244,127,000	12	2,576,485,488	12	3,614,686,040	12	2,724,917,015			12	3,778,110,098	12	2,543,543,192	12	2,767,938,740	12	2,700,086,128	100.00	99.02	100.00	98.72	100.00	92.48	100.00	99.09						
	Pemeliharaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pemeliharaan jasa surat menyurat	12	45,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000	12	23,000,000			12	44,697,000	12	36,975,000	12	45,000,000	12	22,990,000	100.00	99.33	100.00	99.94	100.00	100.00	99.98							
	Pemeliharaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lain-lain	Jumlah Bulan Pemeliharaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lain-lain	12	350,000,000	12	93,900,000	12	318,150,000	12	531,910,000			12	208,379,311	12	85,776,023	12	159,667,500	12	531,910,000	100.00	99.54	100.00	91.35	100.00	50.25	100.00	100.00						
	Pemeliharaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Jasa Kebersihan Kantor	12	100,000,000	12	100,000,000	12	110,000,000	12	102,540,000			12	99,660,000	12	99,540,000	12	108,540,000	12	102,512,000	100.00	99.66	100.00	99.94	100.00	98.68	100.00	99.97						
	Pemeliharaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan alat tulis kantor	12	120,000,000	12	120,000,000	12	150,000,000	12	120,000,000			12	118,826,600	12	119,998,000	12	149,916,000	12	119,931,500	100.00	99.02	100.00	100.00	100.00	99.94	100.00	99.94						
	Pemeliharaan barang cetak dan penggantian	Jumlah Bulan Pemeliharaan bahan cetak dan penggantian	12	175,000,000	12	185,000,000	12	267,500,000	12	194,000,000			12	174,925,000	12	184,995,000	12	267,363,500	12	193,675,000	100.00	99.96	100.00	100.00	100.00	99.95	100.00	99.83						
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	501,250,000	40	228,100,000	40	343,800,000	20	361,000,000			35	337,025,000	33	210,721,900	40	330,183,500	25	368,175,200	87.50	67.24	82.50	92.38	100.00	96.04	100.00	99.22						
	Pemeliharaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12	35,000,000	12	32,200,000	12	65,000,000	12	30,000,000			12	23,883,400	12	27,105,000	12	36,156,000	12	17,200,000	100.00	68.24	100.00	84.18	100.00	60.24	100.00	57.33						
	Pemeliharaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12	146,000,000	12	149,000,000	12	125,000,000	12	5,398,000			12	142,895,000	12	147,450,000	12	119,640,000	7	5,370,000	100.00	97.87	100.00	98.98	100.00	95.71	98.33	99.48						
	Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah dan komunikasi keluar daerah	12	629,550,000	12	600,100,000	36	600,100,000	36	317,300,000			43	822,640,347	37	600,097,517	77	596,130,980	38	313,492,675	358.33	99.19	308.33	100.00	213.89	99.94	100.00	98.80						
	Pemeliharaan jasa tenaga pendamping administrasi/teknis	Jumlah PTF	12	1,493,900,000	12	743,047,488	37	703,826,040	37	653,171,015			37	1,356,732,640	37	743,011,752	37	687,920,160	37	648,306,848	308.33	90.82	308.33	100.00	100.00	97.74	100.00	99.27						
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam daerah	12	446,427,000	12	285,138,000	36	386,508,000	36				31	446,238,800	74	284,873,000	59	284,193,100	38	386,426,900	258.33	99.96	616.67	99.91	163.89	99.29	100.00	99.96						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perawatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65	367,500,000	40	270,900,000	70	330,500,000	70	250,500,000			60	342,338,083	66.87	268,322,605	60	328,836,900	72	237,661,214	92.31	93.15	133.65	99.05	88.07	99.50	100.00	94.87						
	Pemeliharaan gedung/gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung/gedung kantor	1	52,500,000	1	52,500,000	1	52,500,000	1	52,500,000			1	52,500,000	1	52,500,000	1	52,500,000	1	52,500,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	170,000,000	0	0	0	0	1	50,000,000			1	147,612,000	0	0	0	0	1	49,675,000	100.00	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8	90,000,000	8	133,000,000	8	102,800,000	8	82,000,000			8	87,239,083	12	130,491,608	9	191,506,900	9	69,287,714	100.00	96.93	150.00	98.11	112.50	99.33	100.00	84.50						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapannya perlengkapan kantor	28	55,000,000	30	85,400,000	32	66,200,000	34	66,000,000			31	54,985,000	39	85,331,000	30	84,830,000	21	65,968,500	110.71	99.97	130.00	99.92	93.75	99.97	91.78	100.00						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai Evaluasi AKIP	85	0									85	0						100.00	0.00													
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	0	0																														
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu																																
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persepsi Aparatur yang Berprestasi	68.00	75,000,000	60	75,000,000	65	135,000,000					68.68	69,276,900	62.03	74,967,577	47	90,415,480			103.05	92.37	103.38	99.96	72.01	66.97								
	Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	5	75,000,000	15	75,000,000	15	135,000,000					5	69,276,900	6	74,967,577	13	92,468,540			100.00	92.37	40.00	99.96	86.67	68.50								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	74	161,200,000	BB / 76.00	167,376,000	76	164,616,000	76	83,546,000			68.35	175,720,768	72.92	156,442,543	77	94,871,117	76	73,356,206	92.38	96.98	95.58	98.41	101.12	90.99	100.00	87.80						
	Pengumpulan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja BPKD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan indikator realisasi kinerja BPKD	3	161,200,000	3	167,376,000	3	104,616,000	3	83,546,000			3	175,720,768	3	156,442,543	2	94,871,117	3	73,356,206	100.00	96.98	100.00	99.41	66.67	90.69	100.00	87.80						
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	WTP	443,490,000									WOP	223,405,804						30.00	50.38													
	Pemeliharaan gedung/akutansi pemerintah daerah	Jumlah Perbaikan gedung/akutansi pemerintah daerah	0	0																														
	Pemeliharaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	0	0																														
	Pemeliharaan Pokok-Pokok pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Rumpun pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	1	151,550,000									1	145,392,804						100.00	95.93													
	Pemeliharaan pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1	291,340,000									1	78,013,000						100.00	26.73													
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	399,950,000	WTP	480,250,000	WTP	2,413,753,000	WTP	3,015,688,953			WTP	320,991,448	WTP	424,795,881	WTP	516,278,722	WTP	2,400,662,314	100.00	80.25	100.00	88.45	100.00	21.39	100.00	79.81						
	Pemeliharaan Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan Daerah	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan Daerah	3	399,950,000	3	480,250,000	3	572,450,000	3	377,884,900			3	320,951,448	7	424,795,881	3	516,278,722	4	367,443,412	100.00	80.25	233.33	88.45	100.00	90.19	100.00	97.24						
	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah																																
	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan																																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi Pajak Daerah	12	255,682,000									12	237,677,438						100.00	92.96													
	Pemeliharaan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Daftar Transaksi harian (DTH) BPKD	12	255,682,000									12	237,677,438						100.00	92.96													
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kelengkapan waktu Dalam pelaksanaan APBD	Tepat Waktu	2,761,170,000	Tepat Waktu	2,581,163,453	Tepat Waktu	2,717,730,000	Tepat Waktu	2,462,897,999			Tepat Waktu	2,570,343,946	Tepat Waktu	2,429,661,951	Tepat Waktu	3,336,691,916	Tepat Waktu	223,936,2040	100.00	93.00	100.00	94.13	100.00	122.77	100.00	90.92						
	Pemeliharaan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Penda APBD	1	1,588,205,000	1	1,434,985,000	1	1,379,850,000	1	1,176,360,000			1	1,498,891,903	1	1,322,218,501	1	1,343,380,073	2	108,741,942	100.00	94.38	100.00	92.1										

58 | Laporan Tahunan 2021

Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			TARGET KINERJA										REALISASI										CAPAIAN (%)										MASALAH/DAKILAN																	
						2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021																			
						Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran																		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu data penyusunan APBD dan Perubahan APBD	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu data penyusunan APBD dan Perubahan APBD													Tepat Waktu	192,811,497,010.50														Tepat	150,834,950,542.35												100.00	93									
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD													1	625,200,000.00														1	583,225,994.00														100.00	93							
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Ketepatan waktu dalam penetapan Perubahan APBD													1	618,650,000.00														1	549,742,475.00														100.00	89							
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah													12	586,500,000.00														12	565,249,445.00														100.00	96							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah	Tertibnya administrasi Keuangan Daerah													12	789,874,000.00														12	714,243,856.00															100.00	90						
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah realisasi dan sinkronisasi keuangan daerah													4	226,588,000.00														4	205,816,570.00															100.00	91						
	Koordinasi dan penyusunan laporan Realisasi Pelaksanaan dan pengeluaran kas daerah Laporan Atran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyediaan Pembiayaan Pihak Ketiga (PTK)	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi													1	301,100,000.00														1	252,673,000.00															100.00	84						
	Koordinasi dan penyusunan laporan Realisasi Pelaksanaan dan pengeluaran kas daerah Laporan Atran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyediaan Pembiayaan Pihak Ketiga (PTK)	Daftar Transaksi harian (DTH), Pelayanan penggalan Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D													12	262,186,000.00														12	255,754,286.00															100.00	98						
	Koordinasi dan Pelaksanaan Audit Perencanaan dan Pelaksanaan Kas Daerah	Opini Audit BPK													WTP	1,393,370,420.00														WTP	1,311,796,200.00														100.00	94							
	Koordinasi Pelaksanaan Audit Perencanaan dan Pelaksanaan Kas Daerah	Jumlah CPD yang melaksanakan koordinasi dengan pemerintah dan pengeluaran kas													45	139,650,420.00														45	136,381,000.00														100.00	98							
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulan, Triwulan dan Semesteran	Laporan realisasi anggaran													1	1,253,720,000.00														1	1,175,417,200.00														100.00	94							
	Pemeriksaan Unsur Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelayanan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah													12	176,399,641,943.50														12	135,642,654,732.35														100.00	77							
	Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah bulan Penyaluran Bantuan Keuangan													12	146,148,575,590.50														12	123,518,700,850.00														100.00	85							
	Pengelolaan Dana Darurat dan Monev	Jumlah Kegiatan Darurat dan Monev													1	29,050,365,793.00														1	11,623,673,892.35														100.00	40							
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dana bagi hasil Kabupaten/Kota													1	1,200,700,600.00														1	500,279,990.00														100.00	42							
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah													65															65														100.00									
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah													65	1,879,214,579.00														65	1,591,251,736.00														100.00	85							
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga													1	239,292,379.00														1	217,600,000.00														100.00	91							
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah													0														0															0.00									
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dokumen													1	81,059,480.00														1	74,650,000.00														100.00	92							
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan penyaluran barang milik daerah													12	229,429,040.00														12	207,095,000.00														100.00	90							
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen inventaris Barang Daerah													1	120,788,760.00														1	97,066,000.00														100.00	80							
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan monitoring Barang Milik Daerah													1	285,624,580.00														1	243,978,142.00														100.00	85							
	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian aset dalam pemberlakuan pengelolaan Barang Milik Daerah													1	200,000,000.00														1	169,795,400.00														100.00	85							
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah verifikasi data laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah													0														0															0.00									
	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedian Data BMD yang Akutabel													1	184,638,580.00														1	135,643,900.00														100.00	73							
	Rekomendasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekomendasi data aset													2	343,600,000.00													2	316,674,400.00														100.00	92								
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan mutasi barang milik daerah													1	194,781,760.00														1	128,748,894.00														100.00	86							



B. Hasil Capaian Program RPJMD 2016 – 2021 melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2017,2018,2019,2020 & 2021

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna 2016 - 2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 - 2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 - 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 dengan realisasinya.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Program RPJMD 2016-2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017,2018,2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut:

HASIL CAPAIAN PROGRAM RPJMD 2016-2021
MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017, 2018, 2019, 2020 DAN 2021

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target RPJMD Kabupaten pada RKPD Kabupaten Tahun ke										Capaian Target (Realisasi) RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan			Rasio Capaian Akhir (%)		
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		(22)	(23)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	60	10.641.443	12	2.236.643	12	1.917.200	12	2.067.200	12	2.067.200	12	2.353.200	12	3.778.110	12	1.917.200	12	1.917.200	12	2.860.109	12		100	168,92	100	100	100	92,74	100,00	138,36	12		60	10.472.619	100	#VALUE!	
Meningkatnya fasilitas pendukung kelembagaan untuk pelayanan administrasi publik		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	75	1.225.000	65	349.000	65	219.000	70	219.000	70	219.000	75	219.000	100	342.336	100	219.000	100	219.000	100	92.469	70		153,85	98,09	153,85	100	142,86	100,00	142,86	42,22	70		470	872.805	626,67	71,25	
		Program Peningkatan Gedung Aparatur	Persentase Kehadiran Dinas Aparatur	85%	95	555.000	85	75.000	90	120.000	90	120.000	95	120.000	95	120.000	0	0	100	120.000	100	120.000	0	0	95				111,11	100	111,11	100,00	0,00	0,00	95		295	240.000	310,53	43,24	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	75	850.000	55	170.000	60	170.000	65	170.000	70	170.000	75	170.000	120	69.278	120	170.000	120	170.000	100	94.871	70		218,18	40,75	200	100	184,62	100,00	142,86	55,81	70		530	504.147	706,67	59,31	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	80	580.000	BB / 74,00	120.000	BB / 76,00	100.000	76	120.000	76	120.000	A / 80,00	120.000	92,36	175,720	92,36	100.000	92,36	100.000	80	100.780	76		1,25	146,43	1,25	100	121,53	83,33	105,28	83,98	A / 80,00		433,08	476.500	541,35	82,16	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Memperhatikan Fungsi Sarana dan Prasarana	2 Aplikasi	2	3.155.360	2	595.360	2	540.000	2	640.000	2	740.000	2	640.000	2	595.360	2	540.000	2	540.000	2	630.706	2		100	100	100	100	100	100	84,38	100,00	85,23	2		10	2.306.066	500	73,08
		Opini Audit BPK	WTP	WTP	5.590.113	WTP	1.435.000	WTP	1.785.113	WTP	590.000	WTP	590.000	WTP	590.000	WTP	1.435.000	WTP	1.785.113	WTP	1.785.113	WTP	1.115.163	WTP		100	100	100	100	100	100	258,71	100,00	112,64	100		500	6.120.389	100	109,49	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100	9.864.975	100	1.116.493	100	1.014.462	100	1.490.000	100	2.490.000	100	3.754.000	93,33	1.116.493	100	1.014.462	100	1.014.462	100	831.343	100		93,33	100	100	100	100	100	68,09	100,00	33,39	100		493,33	3.976.800	493,33	40,31	
		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	18	3.100.000	16	700.000	17	600.000	17	600.000	17	600.000	18	600.000	18	700.000	54,56	600.000	54,56	600.000		17		100	100	100	100	100	100	320,94	100,00	0,00	0,00	17		144,12	1.900.000	800,67	61,29
			Jumlah Objek Pajak	141	198	10.079.093	160	2.056.280	169	1.615.000	179	2.069.595	188	2.069.595	198	2.069.595	88,75	2.055.280	100	1.615.000	100	1.615.000		188		55,47	100	59,17	100	55,87	78,03	0,00	0,00	188		476,75	5.285.280	240,78	#VALUE!		
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4,40 %	5,64	2.000.000	4,65	400.000	4,92	400.000	4,69	400.000	5,05	400.000	5,64	400.000	5,52	400.000	5,52	400.000	5,52	400.000		5,05		4,65	100	4,92	100	117,70	100,00	0,00	0,00	5,05		21,61	1.200.000	383,16	60,00		
Terdapatnya tata kelola transparan dan akuntabel		Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Terbit administrasi keuangan daerah	12 Bulan	60	6.430.190	12	1.230.190	12 Bulan	1.450.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.350.000	100	1.230.190	100	1.450.000	100	1.450.000	100	1.524.807	100		100	100	100	100	100	100	120,83	100,00	127,07	12 Bulan		500	5.654.997	833,33	87,94
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	80%	100	3.850.000	80	850.000	80	600.000	85	800.000	9000%	800.000	100	800.000	100	850.000	100	600.000	100	600.000	100	74.163	90%		125	100	125	100	117,65	75,00	111,11	9,27	90%		400,9	2.124.163	400,90	55,17	
		Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	WTP	1.436.500	WTP	200.100	WTP	309.100	WTP	309.100	WTP	309.100	WTP	309.100	WTP	200.100	WTP	309.100	WTP	309.100	WTP	220.880	WTP		100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	71,46	100		500	1.039.180	100,00	72,34
			Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	86	1.250.000	80	250.000	80	250.000	82	250.000	84	250.000	86	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	86	439.554	84		125	100	125	100	121,95	100,00	102,38	175,82	84		470	1.189.554	546,51	95,16	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	50	7.109.000	42	1.909.000	44	1.400.000	46	1.400.000	48	1.200.000	50	1.200.000	100	1.909.000	100	1.400.000	100	1.400.000	50	1.723.745	48		238,1	100	227,27	100	217,39	100,00	104,17	143,65	48		398	6.432.745	796,00	90,49	
			Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	50	650.000	42	200.000	44	100.000	46	100.000	48	100.000	50	150.000	100	200.000	100	100.000	100	100.000	50	267.730	48		2,381	100	2,273	100	217,39	100,00	104,17	267,73	48		398	667.730	796,00	102,73	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat / Nilai Akuntabilitas		80	10.519.046,068							80	10.519.046,068									80	9.876.784,104									100	94	80	9.876.784,104	100,00	93,89			
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD	1	192.811.497,011								1	192.811.497,011									1	150.834.950,542									100	78	1	150.834.950,542	100,00	78,23			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah		65	1.879.214,579							65	1.879.214,579									65	1.591.251,736									100	85	65	1.591.251,736	100,00	84,68			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																									
Predikat Kinerja																																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian																																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																									
Tidak Lulus yang diberikan dalam RKPD berikutnya																																									
Tidak Lulus yang diberikan oleh RPJMD berikutnya																																									

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya



C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021

Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran kinerja dari semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan indikator sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2016 - 2021.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada Tahun 2018 - 2021 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan misi, pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan dilakukan dengan maksimal.

Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan namun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terus melakukan perubahan dari sisi kualitas laporan keuangan.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Capaian Indikator Sasaran Pendukung Visi Misi
Bupati Natuna Tahun 2016 - 2021

No.	MISI	INDIKATOR SASARAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					CAPAIAN TARGET PADA AKHIR 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	75	100	100	100	100	100



Ranai, Januari 2022
 Plt. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Pendapatan Daerah

SURYANTO
 Nip.19770912 2000 1 004

D. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017,2018,2019,2020 & 2021

Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan merupakan tolak ukur pencapaian kinerja dalam lima Tahun. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pendukung Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan RPJMD 2016 - 2021 didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 - 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 dengan realisasinya. Dari beberapa Program Tahun 2017 – 2021 terdapat prosentase dan realisasi yang belum tercapai dikarenakan perubahan SOTK OPD dan disebabkan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid19) dan penanganan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ikut mempengaruhi capaian tersebut. Pencapaian Program dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai 100 % dari target yang direncanakan, pencapaian ini membuktikan antara strategi dan kebijakan yang dibuat telah tercapai dengan baik.

Berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017,2018,2019,2020 dan 2021 pada Tabel sebagai berikut:

TABEL 4.10
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN 2016-2021
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NATUNA

No	FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2016	Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2021	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					Capaian Terhadap RPJMD (%)	Keterangan (Tercapai/ Belum Tercapai)	Keterangan
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	75	65	65	70	70	75	100	100	65	100	70	153.85	153.85	65	100	70	91.67	Belum Tercapai	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	85	95	65	90	90	95	95	0	100	85	0	95	0	111.11	85	0	95	66.67	Belum Tercapai	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	50	75	55	60	65	65	75	120	120	66	100	65	218.18	200	66	100	65	105	Tercapai	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	B / 68,35	A / 80,00	BB / 74,00	BB / 76,00	BB / 76,00	BB / 76,00	A / 80,00	92.36	92.36	BB	A/81.32	A/ 80,00	124.811	121.53	100	100	100	96.36	Belum Tercapai	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
		%	100	100	100	100	100	100	100	68	75	75	75	100	68	75	75	75	100	75	Tercapai	
9	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	93.33	100	100	100	100	93.33	100	100	100	100	100	Tercapai	
		%	16	18	16	17	17	17	18	18	54.56	54.56	0	0	112.50	320.94	320.94	0	0	77.28	Belum Tercapai	
		%	141	188	160	169	179	188	198	88.75	100	16	0	0	55.47	59.17	8.94	0	0	100	Tercapai	
		%	4.4	5.65	4.65	4.95	4.69	5.05	5.64	5.52	5.52	5.52	0	0	118.71	111.52	117.70	0	0	551.4	Tercapai	
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	%	12	30	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Tercapai	
		%	12	30	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Tercapai	
10	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Bulan	12	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	80	100	100	100	100	100	100	80	100	100	125	125	80	100	100	100	Tercapai	
12	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	%	60	100	100	80	82	84	86	68	100	100	100	84	68	125	121.95	119.05	97.67	100	Tercapai	
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	%	40	86	80	44	46	48	50	100	100	80	86	48	125	125	80	86	48	100	Tercapai	
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	%	40	50	42	44	46	48	50	100	100	42	50	48	238.1	227.27	42	50	48	100	Tercapai	
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	%	40	50	42	42	46	48	50	100	100	42	50	48	2.381	2.273	42	50	48	100	Tercapai	

Ranai, Januari 2022
 Plt Kepala Badan
 Pengelolaan Keuangan dan
 Aset Daerah
SURYANTO, SE, MA
 NIP. 19770912 2000 12 1 004

E. Program/Kegiatan dan Target Kinerja BPKPD Tahun Anggaran 2022 (Berdasarkan APBD 2022/DPA 2022)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16); Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **“Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya”**.

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menetapkan 6 (enam) program dan 11 (sebelas) Kegiatan yang mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran yang ditetapkan didalam Renstra BPKPD Tahun 2021 – 2026 dengan memanfaatkan sumber dana dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Perjanjinan Kinerja Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berikut disajikan Tabel Pelaksanaan dan Target Kinerja Program dan Kegiatan BPKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

TABEL 4.11
PELAKSANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Keterangan
			Output/ Outcome	Anggaran	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81.25	193,419,000.00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	60	193,419,000.00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	110,129,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	83,290,000.00	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	15,356,637,674.00	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	10,509,829,504.00	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	10,509,829,504.00	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	50	1,807,308,170.00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	1,025,450,000.00	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	12	28,000,000.00	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	49,600,000.00	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	120,000,000.00	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	20,000,000.00	
14	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	120,000,000.00	

15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	444,258,170.00	
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	2,592,500,000.00	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12,500,000.00	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	685,000,000.00	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,895,000,000.00	
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90	447,000,000.00	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	70,000,000.00	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	277,000,000.00	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100,000,000.00	
24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/P YANG TEPAT WAKTU,TEPAT PROSES,DAN TEPAT ISI	92	2,107,674,070.00	
25	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	1	2,107,674,070.00	
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	775,337,000.00	
27	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	742,602,000.00	
28	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	589,735,070.00	

29	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100	131,360,113,560.00	
30	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	100	1,042,193,170.00	
31	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	290,800,000.00	
32	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	564,334,170.00	
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	12	187,059,000.00	
34	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	90	1,125,813,170.00	
35	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	628,506,170.00	
36	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	497,307,000.00	
37	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10	129,192,107,220.00	
38	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	122,941,407,220.00	
39	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	5,000,000,000.00	
40	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	1,250,700,000.00	
41	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	80	2,142,595,520.00	
42	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	100	2,142,595,520.00	
43	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	271,113,970.00	

44	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	75,306,380.00	
45	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	153,300,000.00	
46	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	975,581,170.00	
47	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	148,600,000.00	
48	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	235,376,000.00	
49	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	283,318,000.00	
50	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	5	938,233,000.00	
51	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	6	938,233,000.00	
52	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	58,469,000.00	
53	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	72,095,000.00	
54	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1365	132,075,000.00	
55	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44699	418,000,000.00	
56	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1365	257,594,000.00	
TOTAL				152,098,672,824.00	



Ranai, Januari 2022
 Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

SURYANTO, SE, MA
 NIP. 19770912 200012 1 004

F. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten dengan Kabupaten Lainnya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri Cabang Ranai.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 menyatakan Kepala Daerah menunjuk Bank Umum dalam mengelola uang daerah untuk menyimpan penerimaan dan pengeluaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang: **“Pemanfaatan Fasilitas Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Dana Kas yng Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna”** Nomor: 006/Mou/2018 dan Nomor :007/RNI/2018, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 09 Agustus 2018.

2. Kerjasama dengan BPJS dalam Pelayanan Kesehatan PNS.

Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang Tentang: **“Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Pegawai PTT, GTT dan PTT Paramedis Pemerintah Kabupaten Natuna”** Nomor: 180/HK-PK/36/2019 dan Nomor :PKS/002/112019, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 17 November 2019.

G. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan untuk menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara *gradual* terhadap nilai (*public value*) dan budaya aparat pemerintah daerah

yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan dan pengayoman masyarakat.

Perubahan struktural seharusnya diikuti oleh perubahan kultural, berupa internalisasi *mindset* dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja. Beranjak dari keinginan untuk melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku dan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Daerah di pacu untuk membuat inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sekaligus menjawab amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pasal 11 dimana penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.

Penyelenggaraan inovasi Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya dikenal dengan *Integrated Natuna Financial Information System* (Sistem Informasi Keuangan Natuna Terintegrasi) yang selanjutnya disingkat iNFIS adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. iNFIS terdiri dari beberapa modul dasar, yaitu Modul Perencanaan, Penganggaran, Perbendaharaan, BMD, Tepra, Monitoring, Pelaporan, Absensi, Penggajian,. Kedepannya akan dikembangkan juga modul-modul lain, seperti modul Penggajian, Perjalanan Dinas dan setiap tahun selalu menambah modul serta menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Natuna dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya serta yang paling penting adalah meningkatkan pelayanan publik dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

H. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan Tahun 2022/2023 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2021

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas,Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merekomendasikan program dan kegiatan,dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dan dilanjutkan pada rencana Kerja Tahunan Tahun 2022/2023 di tabel sebagai berikut :

TABEL 4.12
REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 / 2023
DARI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021	REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 / 2023	Keterangan
2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapai	Dilanjutkan	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapai	Dilanjutkan	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tercapai	Dilanjutkan	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapai	Dilanjutkan	

Parai, Januari 2022
 Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 dan Pendapatan Daerah

SURYANTO, SE, MA
 NIP. 19770912 200012 1 004

BAB V

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI

Gambaran Realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Tahun 2021, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan refleksi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut secara ringkas akan dijelaskan sesuai dengan bidang yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas yaitu menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp10,619,046,068,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9,876,784,104,00 atau mencapai 93,89 % merupakan akumulasi dari 6 (enam) kegiatan. Dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp405.042.000,00 dengan realisasi sebesar Rp367,235,800.00 atau sebesar 90.67% dari total 2 (dua) Sub kegiatan yang menjadi Tupoksi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Untuk Sub Bidang Umum dan Kepegawaian dialokasikan anggaran untuk 5 Kegiatan dengan 13 (tiga belas) Sub kegiatan dengan alokasi sebesar Rp 10.114.004.068,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.509.548.304,00 atau realisasi sebesar 94,03%. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2021

NOMOR	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2			3	4	6
				10.519.046.068,00	9.876.784.104,00	93,89
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			405.042.000,00	367.235.800,00	90,67%
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	input	rupiah	50.130.000,00	48.489.800,00	96,73%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	input	rupiah	354.912.000,00	318.746.000,00	89,81%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.529.758.068,00	7.248.383.530,00	96,26%
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	input	rupiah	7.529.758.068,00	7.248.383.530,00	96,26%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000,00	99.979.000,00	99,98%
01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	input	rupiah	100.000.000,00	99.979.000,00	99,98%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			891.200.000,00	664.465.951,00	74,56%
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	input	rupiah	215.000.000,00	95.000.000,00	44,19%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	unit	26,00	19,00	73,07%
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	input	rupiah	80.000.000,00	79.200.000,00	99,00%
		output	bulan	12,00	12,00	93,75%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	input	rupiah	87.000.000,00	20.250.000,00	23,28%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	input	rupiah	145.000.000,00	144.283.000,00	99,51%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	input	rupiah	20.000.000,00	17.100.000,00	85,50%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	input	rupiah	344.200.000,00	308.632.951,00	89,67%
		output	kali	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	73,00	69,00	94,52%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.293.700.000,00	1.242.979.032,00	96,08%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	input	rupiah	25.000.000,00	24.111.000,00	96,44%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	96,44%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	input	rupiah	650.400.000,00	643.246.500,00	98,90%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	input	rupiah	618.300.000,00	575.621.532,00	93,10%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			299.346.000,00	253.740.791,00	84,77%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	input	rupiah	115.205.000,00	73.556.791,00	63,85%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	input	rupiah	184.141.000,00	180.184.000,00	97,85%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
TOTAL				10.519.046.068,00	9.876.784.104,00	93,89

Sumber : Data LRA TA. 2021

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran memiliki tugas yaitu merumuskan prosedur penyusunan rancangan Perubahan APBD, pengendalian penyusunan anggaran, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan

anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Piutang yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (Satu) kegiatan dengan rincian realisasi 1 (satu) program yaitu sebesar Rp1.698.217.914,00 atau sebesar 92,78% dari total anggaran yaitu sebesar Rp1.830.350.000,00 dengan rincian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah realisasi sebesar Rp1,698,217,914,00 atau sebesar 92,78% dari total anggaran yaitu sebesar Rp1,830,350,000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2021

NOMOR	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2			3	4	6
				1.830.350.000,00	1.698.217.914,00	92,78
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.830.350.000,00	1.698.217.914,00	92,78%
02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	input	rupiah	625.200.000,00	583.225.994,00	93,29%
		output	perda	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	input	rupiah	618.650.000,00	549.742.475,00	88,86%
		output	perda	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100%	100%	100,00%
02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	input	rupiah	586.500.000,00	565.249.445,00	96,38%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				1.830.350.000,00	1.698.217.914,00	92,78

Sumber : Data LRA TA. 2021

3. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan. Total realisasi sebesar Rp2,026,042,056,00 atau sebesar 92,80% dari pagu anggaran sebesar Rp2,183,244,420,00 yang mengakomodir pada 2 (dua) kegiatan. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdapat 3 (tiga) Sub kegiatan dengan realisasi Rp714,243,856,00 atau 90,43% dari pagu alokasi sebesar Rp789,874,000,00 Untuk Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp1,393,370,420,00 dengan realisasi Rp1,311,798,200,00 atau sebesar 94,15% dari 2 (dua) Sub kegiatan.

Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Akutansi Keuangan Daerah Tahun 2021

NOMOR	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2			3	4	6
	URUSAN KEUANGAN			2.183.244.420,00	2.026.042.056,00	92,80
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			789.874.000,00	714.243.856,00	90,43%
02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	input	rupiah	226.588.000,00	205.816.570,00	90,83%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	input	rupiah	301.100.000,00	252.673.000,00	83,92%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	input	rupiah	262.186.000,00	255.754.286,00	97,55%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.393.370.420,00	1.311.798.200,00	94,15%
02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	input	rupiah	136.073.660,00	136.381.000,00	100,23%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	input	rupiah	1.257.296.760,00	1.175.417.200,00	93,49%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL			2.183.244.420,00	2.026.042.056,00	92,80

Sumber : Data LRA TA. 2021

4. Bidang Aset

Bidang Aset memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang dalam hal ini melaksanakan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp1,591,251,736,00 atau sebesar 84,68% dari total alokasi sebesar Rp1,879,214,579,00. Berikut disajikan laporan realisasi bidang aset sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Aset TA. 2021

NOMOR	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2			3	4	6
				1.879.214.579,00	1.591.251.736,00	84,68
03.	03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.879.214.579,00	1.591.251.736,00	84,68%
03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	input	rupiah	239.292.379,00	217.600.000,00	90,93%
		output	dokumen	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	input	rupiah	81.059.480,00	74.650.000,00	92,09%
		output	dokumen	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	input	rupiah	229.429.040,00	207.095.000,00	90,27%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	input	rupiah	120.788.760,00	97.066.000,00	80,36%
		output	dokumen	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	input	rupiah	285.624.580,00	243.978.142,00	85,42%
		output	laporan	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	input	rupiah	200.000.000,00	169.795.400,00	84,90%
		output	kegiatan	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	input	rupiah	184.638.580,00	135.643.900,00	73,46%
		output	bulan	12,00	12,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	input	rupiah	343.600.000,00	316.674.400,00	92,16%
		output	bast	2,00	2,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	input	rupiah	194.781.760,00	128.748.894,00	66,10%
		output	laporan	1,00	1,00	100,00%
		outcome	persen	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL			1.879.214.579,00	1.591.251.736,00	84,68%

Sumber : Data LRA TA. 2021

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendukung atas keberhasilan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016 - 2021, Terhadap misi yang diemban oleh **Kepala daerah Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan keuangan.**

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Natuna adalah ***“Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan”*** dengan Indikator Program (*Outcome*) ***“Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku”***, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung visi dan misi RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Natuna. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menetapkan rencana kinerja serta untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari 4 (empat) indikator sasaran yang dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan.

Secara umum 2 (dua) Sasaran strategis yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya karena dampak penanganan pandemic corona virus disease

2019 (covid19) dan dalam penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mempengaruhi capaian tersebut.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sebaiknya mulai dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran secara terukur dan dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan sehingga masing-masing bidang dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan agar sasaran sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai. Beberapa strategi telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendukung dan mencapai visi misi yang ditetapkan. Komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merekomendasikan program kegiatan untuk Rencana Kerja 2022/2023 sebagai berikut:

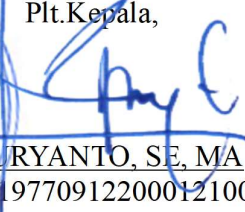
1. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022/2023, terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pemahaman laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk tata kelola Barang Milik Daerah;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2022/2023.
4. Merekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

5. Merekomendasi untuk melanjutkan Program Kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja dan target capaian 2022/2023 terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ranai, 12 Januari 2022



Plt.Kepala,


SURYANTO, SE, MA
NIP. 197709122000121004



Jalan Batu Sisir-Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. (0773) 31445, Fax (0773) 31545, Email : bpkadnatuna@yahoo.co.id
Ranai - Natuna